

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003*, Cet.1, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Asri Wijayanti, *Menggugat Konsep Hubungan Kerja*, Cet.1, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Budiono, S.H., *Penetapan Upah Minimum dalam Kaitannya dengan Upaya Perlindungan Bagi Pekerja/Buruh dan Perkembangan Perusahaan*, Semarang: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007.
- Budiono Rachmad Abdul, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- H. Kartasapoetra, dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Henry Arianto, *Modul 1 Metode Penelitian: Bentuk Penelitian Normatif dan Bentuk Penelitian Empiris*, Jakarta: Univ. Esa Unggul, 2013.
- Husein Umar, *Riset Dalam Organisasi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Cet. 1 Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Kasturi Zulfan, *Kajian Yuridis tentang Penetapan Upah Tenaga Kerja Pada Perusahaan di Indonesia*, Medan: Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenaga kerjaan Indonesia*, Jakarta : PT.Grafindo Persada, 2001.

Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia edisi Revisi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2003.

Saiful Anwar, *Sendi-sendi Hubungan Kerja dengan Pengusaha*, Medan: Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1994.

Sedamaryanti, *Sumber Daya Kerja Dan Produktivitas Kerja*, Bandung : Ilham Jaya, 2003.

Suad Husnan, *Manajemen Personalia*, edisi ketiga, (BPFE Yogyakarta, 1986.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1995.

Verdi Ferdiansyah, *Prosedur Penetapan dan Penangguhan Upah Minimum Provinsi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: FH UI, 2014.

B. On-Line Information via Internet

Hubungan Industri, “Tabel Perbandingan Upah Minimum (UMP) Tahun 2016/2017 di 34 Provinsi di Indonesia” (On-Line), tersedia di <http://hubunganindustri.com> (29 Juni 2017).

Kodrat Wibowo, “Upah dan Produktivitas Tenaga Kerja di Indonesia: Konsep Ekonomi dan Kenyataan” (On-Line), tersedia di <http://www.academia.edu/18996963/> (22 Juni 2017).

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan*, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, LN No. 39 Tahun 2003, TLN No. 4279.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, UU No. 2 Tahun 2004.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan*, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, LN. No. 237 Tahun 2015, TLN No. 5747.

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Upah*, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981, LN. No. 8 Tahun 1981, TLN. No. 3190.

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Upah Minimum*, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-226/MEN/2000.

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, *Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota Se-Provinsi*, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/MEN/2003.

Gubernur Banten, *Keputusan Gubernur Banten tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Banten Tahun 2013*, Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.2/Kep.15-Huk/2013.